

Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia

Tonny Dian Effendi

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: tonny_dian@yahoo.com

Abstract: This paper discusses how the role of Public Diplomacy in strengthening Indonesia-Malaysia. This relationship is important because Indonesia-Malaysia relations conflict is very vulnerable and does not rule out the possibility it was caused due to the negative misconception. Opinion of this people in both countries can be one of the factors that influence the second issue of Public Diplomacy of the state. Because it is very important to strengthen understanding and getting to know each other more closely at the community level so it is not easy to be provoked on the issues that can lead to conflict. This paper is divided into four main parts: the problems between Indonesia and Malaysia, the conceptual approach of Public Diplomacy, Public Diplomacy at the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia and Malaysia as well as the role that can be played by the Public Diplomacy in strengthening relations between the two states. Bagian the end of this paper is a recommendation to the governments of both countries to optimize the role of public diplomacy.

Keywords: Public Diplomacy, Bilateral, Indonesia, Malaysia

Abstraksi: Tulisan ini membahas tentang bagaimana peran Diplomasi Publik dalam memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia. Hal ini penting karena hubungan Indonesia-Malaysia rentan konflik dan tidak menutup kemungkinan hal itu disebabkan karena kesalahpahaman. Persepsi negatif dari masyarakat di kedua negara dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan kedua negara. Oleh karena itu Diplomasi Publik sangat penting untuk memperkuat kesepahaman dan saling mengenal satu sama lain secara lebih dekat di tataran masyarakat sehingga tidak mudah untuk terprovokasi pada isu-isu yang dapat memicu konflik. Tulisan ini terbagi dalam empat bagian utama yaitu permasalahan Indonesia-Malaysia, pendekatan konseptual tentang Diplomasi Publik, Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Malaysia serta peran yang dapat dimainkan oleh Diplomasi Publik dalam memperkuat hubungan kedua negara. Bagian akhir dari tulisan ini adalah berupa rekomendasi kepada pemerintah kedua negara untuk mengoptimalkan peran diplomasi publik.

Kata Kunci : Diplomasi Publik, Hubungan Bilateral, Indonesia, Malaysia

Indonesia-Malaysia :Bangsa Serumpun, Negara Berbeda

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia selama 15 tahun belakangan ini mengalami pasang surut. Tercatat dalam sejarah, Indonesia dan Malaysia pernah mengalami konflik ketika Presiden Indonesia Soekarno, pada waktu itu mengeluarkan seruan untuk menggagalkan pembentukan negara Malaysia yang dalam pandangannya merupakan negara boneka ciptaan Inggris. Seruan ini kemudian dikenal dengan Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada masa Orde Baru, hubungan antara Indonesia dan Malaysia nampak tidak ada masalah yang serius meskipun dalam permasalahan perbatasan, pemerintah Indonesia

dan Malaysia masih memiliki perbedaan cara pandang terhadap tapal batas mereka termasuk perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi permasalahan sejak tahun 1969. Pada tahun 1997 kedua negara sepakat untuk membawa permasalahan dua pulau ini kepada Mahkamah Internasional yang pada akhirnya membawa keputusan untuk menyerahkan kedua pulau ini kepada Malaysia.

Pasca reformasi tahun 1998 di Indonesia, hubungan Indonesia-Malaysia juga mengalami pasang-surut. Tercatat beberapa insiden sempat membuat hubungan kedua negara mengalami permasalahan. Pada tahun 2005, Indonesia dan Malaysia mengalami sengketa atas kepemilikan wilayah

Ambalat.Kemudian pada tahun 2007 terjadi protes dari beberapa kelompok masyarakat Indonesia atas penggunaan lagu Rasa Sayang-Sayange pada iklan pariwisata Malaysia.Kelompok tersebut menyatakan bahwa lagu tersebut adalah lagu daerah Indonesia yaitu Maluku, namun pihak Malaysia menyatakan bahwa lagu tersebut adalah lagu Kepulauan Nusantara (*Malay Archipelago*).Permasalahan serupa kemudian juga muncul dengan obyek yang berbeda seperti kesenian Reog dan Tari Pendet.Pada tahun 2011, sempat terjadi lagi ketegangan ketika nelayan Malaysia yang tertangkap oleh petugas Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia.Permasalahan-permasalahan lain yang juga sering muncul adalah permasalahan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, yaitu permasalahan TKI tidak resmi dan beberapa permasalahan terkait dengan beberapa kekerasan yang mereka alami.

Permasalahan antara Indonesia dan Malaysia secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, adalah permasalahan *high politics* dan kedua adalah *low politics*. Permasalahan yang terkait masalah *high politics* antara Indonesia dan Malaysia banyak diwarnai oleh permasalahan yang berkaitan dengan persoalan perbatasan. Indonesia dan Malaysia masih menyimpan beberapa permasalahan terkait dengan persoalan perbatasan seperti masalah kawasan Ambalat dan masalah tapal batas wilayah di Kalimantan. Sedangkan masalah *low politics* berkaitan dengan permasalahan sosial seperti permasalahan terkait TKI, penyelundupan dan klaim budaya.Indonesia dan Malaysia adalah bangsa serumpun.Itulah semboyan yang sering kali didengar untuk menggambarkan kekerabatan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia.Masyarakat di kedua negara sering

dipandang berada dibawah rumpun Melayu.Dari sisi ini kemudian menjadi wajar ketika masyarakat dikedua negara memiliki kemiripan dalam hal berkesenian.Hubungan kekerabatan ini yang pada awalnya ditujukan untuk mempererat kerjasama dan hubungan baik, namun pada akhir-akhir ini justru menimbulkan beberapa masyarakat terutama terkait dengan klaim budaya. Permasalahan ini tidak menutup kemungkinan disebabkan karena persepsi negatif yang muncul dan juga kurangnya informasi yang benar tentang masing-masing negara. Dari sisi inilah sebenarnya istilah bangsa yang serumpun akan menjadi sebuah nilai yang berharga ketika masyarakat dikedua negara dapat memandang konsep itu sebagai sebuah perasaan kekerabatan, bukan justru menimbulkan persepsi negatif yang menimbulkan kesalahpahaman.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tulisan ini ingin mencoba untuk mengkaji peran diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia yang dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengatasi perselisihan masyarakat dikedua negara yang diakibatkan oleh persepsi negatif ini.

Diplomasi Publik : Pendekatan Konseptual

Pada era globalisasi, ketika hubungan antar manusia menjadi semakin kompleks, opini publik memiliki pengaruh yang kuat dalam kebijakan luar negeri sebuah negara. Hal ini juga dipengaruhi oleh proses demokratisasi diberbagai negara khususnya di negara-negara berkembang. Pada awal abad 21, terdapat sekitar 60 negara didunia meliputi kawasan Eropa, Asia dan Amerika Latin berada dalam proses

⁵⁰ Samuel P. Huntington, 1992, *The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press.

demokratisasi seperti negara-negara di Eropa Timur dan di Asia Tenggara seperti Indonesia, dan kemudian menunjukkan tren global.⁵⁰ Demokrasi telah membawa pengaruh pada kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan pemikiran politik mereka. Pemikiran politik ini tidak hanya menyangkut isu domestik namun juga pada isu internasional. Fenomena ini juga didukung dengan globalisasi ekonomi dengan konsep ekonomi pasarnya yang mencoba untuk membuka batas negara dan juga perkembangan teknologi dan informasi dimana internet menjadi alat yang sangat umum dalam hubungan dan komunikasi antar manusia. Jarak dan waktu bukanlah sebuah kesulitan. Oleh karena itu, opini publik menjadi sangat penting dan berpengaruh dalam kebijakan luar negeri sebuah negara.

Apa itu diplomasi publik? Konsep diplomasi publik dapat dilihat dari sisi publik sebagai obyek dan subyeknya. Publik sebagai obyek, dalam artian publik di negara lain adalah obyek atau tujuan dari diplomasi negara. sedangkan publik sebagai subyek dalam artian publik di tataran domestik ikut serta dalam aktifitas diplomasi negara/pemerintah.

Diplomasi merupakan salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional. Dalam pendekatan tradisional, diplomasi didefinisikan sebagai sebuah seni bernegosiasi dengan negara yang lain. Dalam perkembangan diplomasi saat ini, beberapa ahli mengatakan bahwa diplomasi telah meninggalkan sisi tradisionalnya yaitu dominasi negara. Telah terjadi perubahan sifat diplomasi yang mana

diplomasi mengarah pada manajemen hubungan antara negara dan aktor hubungan internasional yang lain.⁵¹

Kata diplomasi publik pertama kali digunakan di media *The London Times* pada bulan Januari 1856.⁵² Mereka menggunakan kata ini untuk mengkritik kebijakan Presiden Franklin Pierce dan mendorongnya untuk memberikan contoh kepada warga dalam proses diplomasi. Atau dengan kata lain, diplomasi publik dalam konteks ini didefinisikan sebagai sebuah cara untuk menjelaskan kebijakan kepada publik. Pada bulan Januari 1871, *The New York Times* melaporkan perdebatan di Kongres tentang intrik rahasia dalam kebijakan menganeksasi Republik Dominika. Dalam laporan itu disampaikan bahwa kebijakan seharusnya dibuka atau disampaikan kepada publik untuk mendapatkan atau membentuk opini publik dalam konteks diplomasi publik. Dari sudut pandang media massa, kata diplomasi publik juga digunakan oleh pemimpin politik seperti Presiden Wilson pada tahun 1918 yang menyampaikan empat prinsip dalam pemerintahannya. Dalam periode ini, diplomasi publik lebih didefinisikan pada usaha untuk membuka atau menyampaikan kebijakan kepada publik. Hal ini berarti bahwa diplomasi lebih kedalam dalam artian untuk menjelaskan kebijakan kepada publik didalam negeri. Pasca Perang Dunia, konsep diplomasi publik lebih banyak digunakan atau sebagai penyamaran atas apa yang disebut dengan propaganda.⁵³

Dimulai pada tahun 1960an, praktik diplomasi mulai mengalami perubahan.

⁵¹ Barston, R.P, 1997, Modern Diplomacy, Pearson Education, England, halaman. 1

⁵² Nicholas J Cull, "Public Diplomacy' before Gullion : The Evolution of a Phrase", <http://uscpublicdiplomacy.com/pdfs/gullion.pdf>, accessed on December 20th, 2009

⁵³ ibid

⁵⁴ Julius P Hermawan (ed), 2007, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi* (Transformation in the International Relations Studies : Actors, Issues and Methodology), Graha Ilmu Bandung, halaman. 52

Professor Mowat dalam bukunya *Diplomacy and Peace* membagi diplomasi dalam tiga masa perkembangan. Ketiga masa perkembangan tersebut adalah pada tahun 467-1475 yang disebut dengan masa kegelapan dimana diplomasi belum diorganisasi dengan baik. Kemudian pada tahun 1473-1914 yang disebut dengan diplomasi sistem negara Eropa, dan pasca Diplomasi Terbuka (*open diplomacy*) sebagai hasil pemikiran dari Woodrow Wilson pada tahun 1918.⁵⁴ Dalam diplomasi publik, Wilson mengatakan, “... *open covenants openly at, after which there should be no private international understanding of any kind, but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view*”. Pemikiran ini menekankan pada era demokrasi diplomasi dimana publik dapat melihat, mengkaji dan ikut menyampaikan aspirasinya yang berhubungan dengan diplomasi sebagai salah satu alat dalam kebijakan luar negeri. Hal ini menjadi rasional karena setiap dampak dari kebijakan luar negeri akan menyentuh publik, sehingga publik sendiri seharusnya dilibatkan dalam proses diplomasi.

Dari sisi akademik, perkembangan diplomasi publik adalah merupakan salah satu aspek dari respon terhadap konsep keamanan saat ini. Politik dunia sedang berada dalam tahapan transisi dari pendekatan realis ke neorealis dalam memandang konsep keamanan. Hal ini menyangkut tentang asal dari ancaman, sifat keamanan, perubahan respon, perubahan dalam tanggungjawab terhadap keamanan dan inti nilai dari keamanan.⁵⁵ Dalam pandangan ini, kita dapat menganalisa persepsi dan respon terhadap permasalahan dunia saat ini yang sebagian besar saat ini tidak didominasi oleh aktor negara.

Tanggungjawab dalam isu ini saat ini terbagi dan

⁵⁵ Perwita, Banyu, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (The Introduction of International Relations), Rosda Karya, Bandung

banyak dijalankan oleh publik.

Perkembangan teknologi, informasi dan transportasi menghasilkan beberapa perubahan. Aktifitas diplomasi tidak lagi secara ekslusif menjadi domain dari aktor diplomasi resmi dibawah negara. Harold Nicholson mengatakan bahwa pertumbuhan komunikasi dan teknologi menyebabkan peran dan fungsi dari duta besar menjadi menurun dan diplomat mengalami penurunan derajat kerja sebagai staf administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini, dalam lingkup diplomasi, peran publik tidak dapat dihentikan. Kompleksitas dari permasalahan dan hubungan antar manusia serta dukungan dari teknologi informasi dan transportasi membuat diplomasi publik semakin penting dan signifikan.

Praktek diplomasi saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah revolusi dalam teknologi dan informasi, peningkatan peran media massa, globalisasi di bisnis dan system keuangan sehingga meningkatkan aktifitas diplomasi ekonomi, peningkatan partisipasi publik dalam hubungan internasional, perkembangan isu antar negara seperti hak asasi manusia, lingkungan, pengungsi, terorisme dan kriminalitas internasional.⁵⁶ Hal ini membawa implikasi bahwa permasalahan internasional saat ini sedang berada dalam tanggung jawab publik secara umum. Pertimbangan ini membuat banyak negara saat ini sedang berusaha untuk memperkuat peran warga negaranya dalam diplomasi.⁵⁷ Para pendukung dari diplomasi publik percaya bahwa saat ini tidak ada fenomena atau isu baik dalam isu domestik maupun internasional yang terlepas dari analisa

⁵⁶ Julius P Hermawan, *op cit.*, halaman. 59

⁵⁷ Djelantik, Sukawarsini, 2008, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Diplomacy : Theory and Practice), Graha Ilmu, Bandung

publik. Salah satu contohnya adalah perkembangan organisasi non pemerintah atau NGO yang mencapai lebih dari 15.000 yang menangani beberapa permasalahan internasional.

Dalam diplomasi publik, masyarakat baik dalam konteks individu maupun kelompok dapat memberikan inisiatif kepada kebijakan pemerintah dan termasuk didalamnya aktifitas yang seharusnya dapat membentuk opini publik dinegara lain. Diplomasi publik juga semakin menurunkan derajat perbatasan antar negara. Dalam komunikasi global, opini publik dapat secara efektif mempengaruhi perilaku negara. Aktifitas dan pengaruh dari aktor non negara juga meningkat baik dalam konteks jumlah maupun jenisnya.

Sebenarnya belum ada konsep yang mantap dan tetap dalam penjelasan tentang diplomasi publik. Terdapat banyak argumen tentang ini. Menurut panitia perencana penyatuan USIA (*United States Information Agency*) dalam Department Luar Negeri Amerika Serikat, pada 20 Juni 1997 mendefinisikan diplomasi publik sebagai sebuah usaha untuk mempromosikan kepentingan nasional Amerika Serikat dengan menumbuhkan pemahaman, menginformasikan dan mempengaruhi masyarakat dinegara lain. Perbedaan antara diplomasi publik dan hubungan masyarakat (*public affairs*) adalah jika hubungan masyarakat adalah tentang bagaimana menginformasikan kebijakan

kepada publik, sedangkan diplomasi publik membutuhkan komunikasi dua arah dan ditujukan kepada publik secara internasional.⁵⁸

Kamus Hubungan Internasional menyebutkan bahwa diplomasi publik didefinisikan sebagai usaha sebuah negara untuk mempengaruhi opini publik di negara lain dengan menggunakan beberapa instrumen seperti film, pertukaran budaya, radio dan televisi.⁵⁹ Sedangkan Jan Mellison melihat diplomasi publik seperti anggur lama dalam botol yang baru (*the old wine in the new bottle*).⁶⁰ Pendapat tentang kekuatan opini publik sebenarnya telah menjadi bahasan sejak Perang Dunia pertama. E.H Carr menulis bahwa kekuatan opini juga penting dalam pencapaian tujuan politik sama seperti kekuatan secara militer dan ekonomi dan memiliki hubungan erat atas keduanya.⁶¹ Perbedaan diplomasi publik dengan diplomasi tradisional adalah pada targetnya. Diplomasi tradisional menfokuskan pada keterwakilan negara dan biasanya menggunakan hubungan secara resmi, sedangkan diplomasi publik memfokuskan diri pada publik di negara lain dan banyak melibatkan aktor selain negara dalam hubungan yang kadang tidak resmi.⁶²

Diplomasi publik juga dikenal sebagai sebuah instrumen politik. Hal ini digunakan oleh negara, dalam hubungannya dengan aktor negara dan non negara untuk memahami budaya, perilaku dan mengatur hubungan,

⁵⁸ Public Diplomacy Alumni Association, “What is Public Diplomacy”, accessed in December 8, 2009 <<http://www.publikdiplomacy.org/1.htm>>

⁵⁹ U.S. Department of State, 1987, *Dictionary of International Relations Terms*, halaman. 85

⁶⁰ Jan Melisen, “The New Environment”, Jan Melisen (ed), 2005, *The New Public Diplomacy : Soft Power in International Relations*, PALGRAVE MCMILAN, New York, halaman. 3-4

⁶¹ E. H. Carr, 1983, *The Twenty Years' Crisis 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations*, Macmillan, Basingstoke, halaman. 132 dan 141.

⁶² Jan Melisen, *op cit.*, halaman. 5

⁶³ Bruce Gregory, 2008, *Public Diplomacy : The Sunrice of an Academic Field*, The ANNALS of The American Academy of Political and Social Science, accessed on December 28th, 2009,

mempengaruhi opini dan tindakan untuk mendapatkan kepentingan. Pada abad ke dua puluh satu, perubahan dalam konteks globalisasi, struktur jaringan dan teknologi baru menyebabkan transformasi beberapa mekanisme seperti beasiswa, pemerintahan dan negara dalam diplomasi publik.⁶³ Perubahan ini membawa aktor non negara sebagai pelaku utama seperti pemerintah atau diplomasi resmi. Mereka dapat menggunakan kapabilitas mereka yang kadang-kadang tidak memiliki hubungan dengan politik yang kadang mempermudah pemahaman dari pihak lain. Oleh karena itu diplomasi publik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kesepahaman dan menghindari konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Dan salah satu implementasinya adalah program pertukaran.⁶⁴

Diplomasi publik juga didefinisikan sebagai sebuah usaha dimana sebuah negara berusaha untuk mempengaruhi opini dari publik maupun pemimpin dinegara lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri.⁶⁵ Hal ini juga terkait dengan proses komunikasi dari pemerintah sebuah negara kepada publik dinegara yang lain dengan mengirim pesan tentang pemikiran atau kebijakan negara tersebut.⁶⁶

Untuk mengidentifikasi diplomasi publik, Humphrey Taylor juga membedakan diplomasi publik dengan diplomasi tradisional dalam sudut pandang yang lain. Diplomasi tradisional sering menggunakan “*hard power*”

⁶⁴ James F Hoge Jr, 2003, *The Benefits of Public Diplomacy and Exchange Programs*, National Council for International Visitors, March 12, 2003

⁶⁵ Jarol B Manheim, 1990, *Strategic Public Diplomacy : The Evolution of Influence*, Oxford University Press, New York, halaman.4

⁶⁶ Hans Tuch, 1990, *Communicating with the World : U.S Public Diplomacy Overseas*, St. Martin's Press, New York, halaman. 3

atau menggunakan kekuatan militer dan ekonomi. Usaha semacam ini kadang-kadang dapat menemui keberhasilan namun disisi lain juga membuka kemungkinan justru menimbulkan kebencian, ketakutan, atau ketidakpercayaan. Diplomasi publik menggunakan “*soft power*”, dengan menggunakan kebudayaan, pendidikan, kapabilitas militer dalam artian secara kualitas seperti bantuan teknis dan pendidikan militer, maupun ekonomi. Tujuan utama dari diplomasi publik ini tidak hanya memunculkan atau membentuk sikap saling menghormati namun juga menimbulkan ketertarikan.⁶⁷ Namun disisi lain, menjadi sulit untuk membedakan antara diplomasi publik dengan pembentukan citra negara atau *state branding*. Simon Anholt mengatakan bahwa jika diplomasi publik merupakan satu kajian penting dalam hubungan internasional untuk membangun negara, sedangkan *nation branding* lebih mengarah pada konteks studi pembangunan ekonomi dan banyak dilakukan oleh negara yang ingin lebih memperkenalkan diri seperti negara-negara kecil.⁶⁸ Atau dengan kata lain, perbedaannya adalah pada tujuan politik dan ekonomi. Namun permasalahan lain yang kemudian muncul adalah, tujuan antara politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan secara mudah. Dalam pandangan yang pertama, diplomasi publik diketahui berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau fungsi utamanya adalah menjelaskan kebijakan negara terkait dengan negara lain. Tapi dalam era modern saat ini,

⁶⁷ Humphrey Taylor, 2008, *The Not-So-Black Atr of Public Diplomacy*, World Policy Journal, Winter 2007/2008, The World Policy Institute, halaman. 51-59

⁶⁸ Simon Anholt, 2006, “Public Diplomacy and place branding : Where's the link?” (editorial), in Simon Anholt (ed) *Place Branding 2*, Palgrave Mc Millan, halaman. 271-275

kadang-kadang kebijakan ini juga mempengaruhi oleh sektor ekonomi.

Simon membagi tahap perkembangan diplomasi dalam tiga tahap. Pertama adalah ketika para pelaku diplomasi publik secara sederhana menempati posisinya dalam pemerintahan untuk menentukan beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil. Tahap kedua adalah ketika fungsi dari para aktor masih mendasar untuk “menjual” kebijakan negara, namun lingkup para aktor ini semakin meningkat dan memiliki kewenangan lebih untuk mengatur kondisi dan bentuk penyampaian isi dari kebijakan luar negeri ini. Dan tahapan terakhir adalah dimana diplomasi publik digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri dalam dua cara sekaligus, baik secara formal maupun informal. Atau dengan kata lain, diplomasi publik digunakan sebagai instrumen kebijakan daripada sebuah metode komunikasi.⁶⁹

Hirarki dan Aktifitas Diplomasi Publik

Dalam implementasi dari diplomasi publik ini terdapat berbagai hirarkhi dan aktivitas. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan diplomasi publik ini melewati beberapa tahapan dan masing-masing tahapan ini memiliki aktifitas yang berbeda-beda.

Tahap pertama adalah tahapan dimana diplomasi dijalankan dengan tujuan yang paling mendasar yaitu meningkatkan pengetahuan publik atau dunia internasional tentang keberadaan negara tersebut. Hasil yang diharapkan dari tahap dasar ini adalah untuk memperkenalkan negara tersebut bagi publik negara lain atau dengan kata lain, tujuan utama dari tahapan ini adalah agar negara dan publik dinegara lain tahu keberadaan negara yang

bersangkutan. Aktifitas yang dilakukan dalam tahapan ini adalah melakukan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan keberadaan sebuah negara kepada negara lain termasuk juga masyarakat didalamnya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan misalnya dengan memperbarui citra yang selama ini ada atau meningkatkan citra yang sudah ada agar lebih dikenal oleh masyarakat negara yang lain.

Tahapan kedua adalah tahapan dimana ketika masyarakat negara lain telah mengenal dan terbiasa dengan keberadaan negara yang bersangkutan maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan apresiasi terhadap negara tersebut. Setelah sebuah negara dikenal oleh masyarakat negara lain, hal selanjutnya yang dilakukan adalah berusaha agar masyarakat negara lain tersebut memiliki pandangan yang positif terhadap negara tersebut atau memiliki apresiasi yang positif. Aktifitas yang dilakukan dalam tahapan ini adalah dengan menciptakan persepsi yang positif atau mencoba untuk menggambarkan bahwa negara yang bersangkutan ini penting dalam dunia internasional atau dalam isu tertentu negara ini memiliki kelebihan baik dari segi kapasitas, kapabilitas dan juga peran yang dimainkan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan cara menunjukkan dirinya sebagai “teman” dimana memiliki persamaan pandangan terhadap isu tertentu.

Setelah masyarakat negara lain telah mengenal dengan baik dan memiliki pandangan positif, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menciptakan keterikatan dengan masyarakat negara lain. Meningkatkan keterikatan ini dalam artian bahwa ketika masyarakat negara lain telah memiliki pandangan positif maka kedekatan dengan negara tersebut menjadi semakin penting. Aktifitas yang dilaksanakan adalah misalnya dengan mengundang masyarakat dari

⁶⁹ Ibid.,

luar negeri untuk datang berkunjung baik untuk belajar, pariwisata, membeli produk dan mampu memahami budaya dan nilai yang ada.

Ketika ketiga tahapan telah terlampaui maka tahapan yang terakhir adalah dengan tahap mempengaruhi. Tahapan ini dilakukan dengan banyak cara seperti misalnya meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan semisal pertukaran pelajar dan mahasiswa, memberikan beasiswa, penelitian bersama dan lain sebagainya. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga menjadi hal yang penting untuk mengikatkan hubungan menjadi lebih erat seperti perjanjian investasi, perdagangan dan lain-lain.

Tabel 3. Tingkatan Aktifitas Diplomasi

Hirarki	Aktifitas
Meningkatkan pengetahuan dan pengenalan masyarakat	Membuat masyarakat memikirkan tentang negara tersebut dan
Meningkatkan apresiasi masyarakat	Menciptakan persepsi positif, mengajak melihat beberapa isu
Meningkatkan keterkaitan dan ketertarikan masyarakat	Memperkuat hubungan kerjasama pendidikan kearah kegiatan bersama, mengundang masyarakat untuk mengunjungi tempat
Mempengaruhi masyarakat	Mengajak perusahaan untuk berinvestasi, mendapatkan dukungan masyarakat dan

Source : Mark Leonard *et al.*, 2002, *Publik Diplomacy*, The Foreign Policy Centre, London, halaman.8

⁷⁰ Pada bagian ini, sumber data didapatkan dari informasi yang tersedia di laman web masing-masing Kemenlu yaitu Kemlu.go.id untuk Kemenlu Indonesia dan kln.gov.my untuk Kemenlu Malaysia.

Diplomasi Publik Pemerintah Indonesia dan Malaysia⁷⁰

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana struktur dan peran bagian diplomasi publik pada masing-masing kementerian luar negeri di Indonesia dan Malaysia. Bagian ini menunjukkan pada hal apa saja yang menjadi tanggungjawab dan wewenang bagian diplomasi publik dan bagaimana implementasinya secara umum.

Kementerian Luar Negeri Malaysia memiliki departemen informasi dan diplomasi publik yang memiliki fungsi untuk mempromosikan pemahaman tentang Malaysia, institusi dan kebijakannya; mempengaruhi pembentukan berbagai opini dan juga pengambil kebijakan baik didalam negeri maupun diluar negeri; memproyeksikan citra dan menjaga kepentingan negara dalam mendukung iklim yang bagus bagi perdagangan dan pariwisata Malaysia; mempromosikan negara sebagai pemasok barang dan jasa yang terpercaya; dan memberikan dukungan kepada kebijakan luar negeri Indonesia dalam jangka panjang.

Departemen ini memiliki dua bagian utama. Pertama, adalah sebuah badan yang menangani masalah pemberitaan media, hubungan dengan mediamassa, melakukan promosi dan publikasi. Sedangkan bagian yang kedua adalah bagian diplomasi publik dimana kegiatan utamanya adalah program-program kunjungan keluar, penelitian, dokumentasi, portal dan database.

Implementasi dari diplomasi publik Malaysia adalah penyebarluasan pidato-pidato dari pemimpin Malaysia seperti Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Implementasi lainnya adalah memberikan informasi tentang kebijakan luar

negeri Malaysia, menganalisa dan memonitor tren dan isu global yang berkaitan dengan Malaysia, menyusun rancangan analisa untuk Menteri Luar Negeri dan bertindak sebagai bagian penting dalam implementasi dan memonitor masyarakat Malaysia di luar negeri dan melaksanakan program “*Mendampingi Rakyat Malaysia*” di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri Indonesia juga memiliki badan khusus yang menangani diplomasi publik. Kemenlu RI membentuk Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Direktorat ini membawahi beberapa bagian seperti Sekretariat Direktorat Urusan Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Diplomasi Keamanan dan Direktorat Kerjasama Teknis. Fungsi utama dari badan ini antara lain adalah mempersiapkan kebijakan Kemenlu tentang informasi dan diplomasi publik; melaksanakan kebijakan dalam konteks informasi dan diplomasi publik; merancang standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam urusan informasi dan diplomasi publik; fungsi pengarahan dan evaluasi; dan melaksanakan fungsi administrasi Direktorat Jenderal.

Sementara itu secara khusus, Direktorat Diplomasi Publik memiliki beberapa fungsi seperti persiapan, koordinasi dan implementasi, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur; dan memberikan pedoman teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan pedoman pada standar kebijakan dan teknis dalam pelaksanaan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan dari publik didalam dan luar negeri melalui pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia baik dibidang politik, ekonomi, keamanan, pembangunan, sosial dan budaya, dan isu strategis.

Dalam konteks ini kita bias melihat

bahwa kedua negara menganggap persoalan yang berkaitan dengan diplomasi publik ini menjadi penting. Hal ini terlihat dari dibentuknya badan khusus pada masing-masing Kemenlu untuk menangani permasalahan yang terkait dengan diplomasi publik ini. Fokus utama kedua negara, seperti halnya dijelaskan dalam definisi dan tujuan dari diplomasi publik, adalah untuk membangun dukungan publik didalam dan luar negeri bagi kebijakan luar negerinya dan menyebarluaskan informasi kepada publik untuk membangun kesepahaman bersama baik bagi publik didalam negeri maupun di luar negeri.

Peran yang dapat dimainkan oleh Diplomasi Publik dalam Hubungan Indonesia-Malaysia

Aktivitas utama dari diplomasi publik adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam membangun pemahaman bersama dan mengurangi kesalahpahaman tentang kebijakan luar negeri. Diplomasi publik dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Malaysia dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memainkan peranan penting terutama dalam mengurangi persepsi negatif antara kedua belah pihak. Pada konteks ini sebenarnya diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, meskipun disatu sisi memang kita tidak bisa mengesampingkan kepentingan politik didalamnya.⁷¹

Terdapat banyak jalur yang dapat dilakukan sebagai implementasi diplomasi

⁷¹ Dalam konteks ini, konsep diplomasi dipakai untuk menjelaskan kebijakan luar negeri sebuah negara. Sehingga apapun namanya, ketika konsep diplomasi ini muncul maka akan terbesit didalamnya tentang kepentingan politik negara melalui kegiatan yang dilaksanakan. Olehkarena itu diplomasi public, meskipun dapat terjadi public sebagai pelaku maupun sasaran, namun terdapat kepentingan politik didalamnya.

publik. Pada bagian ini akan dibahas beberapa jalur yang dapat digunakan oleh pemerintah kedua negara dalam melaksanakan diplomasi publik.

a. Jalur Pendidikan dan Budaya

Hubungan Indonesia dan Malaysia dalam konteks pendidikan telah terjalin sejak lama. Kedua negara telah melaksanakan banyak sekali pertukaran pelajar maupun pengajar. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia pada tahun 2008 mencapai 14.359 orang. Jumlah ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 10.392 orang, namun mengingkat kembali pada tahun 2010 menjadi 13.627 orang. Dilain pihak, jumlah mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 2.344 dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 5.788 orang, hingga mencapai 6.086 orang pada tahun 2010.⁷² Mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia sebagian besar belajar di beberapa universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Sumatera Utara.⁷³ Data lain juga menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 4000 dosen dari Indonesia mengajar di Malaysia. Malaysia juga disebut menempati salah satu negara tujuan belajar favorit pelajar Indonesia bersama dengan Australia, Amerika Serikat, Jepang dan Jerman.⁷⁴

Data-data diatas menunjukkan sebuah kesempatan dalam optimalisasi diplomasi publik. Keberadaan mahasiswa Malaysia di Indonesia dan sebaliknya, merupakan salah satu

sasaran penting dalam implementasi diplomasi publik. Beberapa program seperti beasiswa dan program khusus seperti pelatihan, kursus dan pertemuan pelajar dan mahasiswa Indonesia-Malaysia. Saat ini juga banyak universitas di Indonesia yang memiliki kerjasama pendidikan dengan universitas di Malaysia. Dalam konteks ini sebenarnya pemerintah dikedua negara memiliki kesempatan untuk lebih mengoptimalkan kerjasama yang telah dibangun di level publik ini untuk membangun sebuah kesepahaman bersama. Dari kerjasama ini, misalnya kemudian dapat dibangun sebuah kurikulum bersama terutama tentang sejarah di Asia Tenggara dimana terdapat bangsa Melayu yang terpisah oleh dua negara Indonesia dan Malaysia.

Jalur pendidikan ini sangat penting terutama dalam pembelajaran dan pemahaman tentang keserumpunan antara Indonesia dan Malaysia. Alasannya adalah bahwa jaman telah berganti, demikian pula generasinya. Generasi muda Indonesia dan Malaysia saat ini telah berganti dengan generasi yang terterpa oleh arus globalisasi. Oleh karena itu jika pembelajaran dan pemahaman tentang keserumpunan itu masih didasarkan pada pembelajaran pada generasi sebelumnya alangkah menjadi kurang tepat. Penjelasannya adalah generasi sekarang memerlukan pendekatan baru dalam menjelaskan keserumpunan itu, memang keserumpunan dalam konteks sejarah dan budaya masih sangat penting untuk dijelaskan, namun juga keserumpunan ide-ide kontemporer yang berkaitan dengan isu-isu global yang saat ini berdekatan dengan kehidupan sehari-hari juga sangat penting. Penjelasan tentang keserumpunan ini tidak hanya dijelaskan dalam konteks persamaan adat, tradisi ketimuran namun perlu ditambah dengan keserumpunan dalam konteks yang kontemporer seperti

⁷² Sriwijaya Post, 9 Maret 2011

⁷³ Republika, 4 maret 2011

⁷⁴ Rimanews.com, 5 Desember 2011

misalnya keserumpunan terhadap penghormatan HAM, keserumpunan pemanfaatan teknologi yang bias diimplementasikan dalam kerjasama penelitian bersama untuk kemanfaatan bersama.

Keserumpunan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai berbagi budaya, namun juga dapat dipahami sebagai berbagi ide bersama untuk kepentingan bersama. Keserumpunan ini juga dapat dijelaskan dan dilaksanakan melalui berbagai tim-tim bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam beberapa bidang. Oleh karena itu pendidikan tentang keserumpunan ini perlu untuk ditingkatkan dan dilaksanakan dalam kurikulum bersama di Indonesia dan Malaysia.

Disisi lain, Indonesia dan Malaysia juga memiliki kemiripan sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam konteks ini, kedua masyarakat berbagi nilai yang sama yaitu nilai ke-Islaman. Memang tidak dipungkiri bahwa terdapat banyak perbedaan dalam implementasi di lapangan, namun setidaknya terdapat kelompok atau organisasi Islam di kedua negara yang memiliki persamaan pandangan. Oleh karena itu, hubungan antar organisasi Islam di kedua negara dapat dipandang sebagai *people to people contact* dimana pemerintah dapat “menggunakannya” sebagai sarana dalam penyebarluasan informasi. Kerjasama antar kelompok ini juga tidak hanya antar organisasi Islam, namun mungkin juga organisasi yang lain dalam konteks *Non Government Organization* (NGO). Pemerintah dapat meningkatkan dorongan dan fasilitas kerjasama antar lembaga masyarakat ini sembari juga melaksanakan proyek diplomasi publik untuk meningkatkan kesepahaman masyarakat kedua negara.

Dalam konteks budaya, hal yang dapat dibangun melalui diplomasi publik adalah permasalahan identitas bersama. Hal ini masih

terkait dengan keserumpunan yang dibahas sebelumnya. Banyak permasalahan yang kemudian muncul akibat klaim budaya. Masing-masing pihak memiliki argumentasinya sendiri-sendiri dan seringkali tidak menemukan titik temu. Hal yang dapat dilakukan dalam konteks diplomasi publik adalah kerjasama kebudayaan seperti pembangunan pusat kajian kebudayaan di kedua negara, atau pameran kebudayaan kedua negara dan bahkan sangat mungkin untuk dilakukan kolaborasi budaya dimana masyarakat Indonesia dan Malaysia terlibat didalamnya.

b. Ekonomi dan Perdagangan

Perdagangan antara Indonesia dan Malaysia juga mengalami perkembangan yang bagus. Total perdagangan Indonesia-Malaysia mencapai 15.354.841,1 (Ribu US\$) pada tahun 2008, dengan tren perdagangan mengalami kenaikan sebesar 36,24% dari tahun 2004-2008. Sedangkan total perdagangan pada tahun 2009 sebesar 12.500.255,0 (Ribu US\$) atau mengalami penurunan sebesar 18,59%.⁷⁵

Data perdagangan diatas tidak hanya menunjukkan hubungan ekonomi semata namun juga menunjukkan tingkat saling ketergantungan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dari sisi saling ketergantungan kita bisa melihat bahwa semakin tinggi nilai perdagangan kedua negara pada dasarnya saling ketergantungan diantar keduanya juga semakin tinggi. Sementara itu dalam konteks hubungan bisnis atau perdagangan, transaksi ekonomi

⁷⁵ http://www.kbriklualalumpur.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=176:neraca-perdagangan-indonesia-dengan-malaysia-2004-2009&catid=46:perdagangan, diakses tanggal 30 Februari 2013.
www.internetworldstats.com/stats3.htm , diakses pada 29 Februari 2013.

akan sulit dilakukan apabila tidak ada kepercayaan. Berdasarkan asumsi ini maka jika nilai perdagangan tinggi maka sebenarnya ada kepercayaan diantara kedua belah pihak, minimal masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi ini.

Dari sisi diplomasi publik hal ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik melalui sector perdagangan. Dalam sektor perdagangan ini juga dapat menjadi sarana untuk membangun citra positif dari masing-masing negara mengingat masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini juga banyak jumlahnya. Kegiatan yang mungkin bisa dilaksanakan adalah pameran perdagangan bersama yang tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar di masing-masing negara namun juga menyentuh pada masyarakat di daerah.

c. Teknologi dan Informasi

Pertumbuhan teknologi dan informasi dapat menjadi pendukung kegiatan diplomasi publik. Internet dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan citra positif sebuah negara. Pemerintah juga dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi sekaligus mendorong dukungan publik atas kebijakan yang diambil. Publik semestinya diberikan akses yang lebih luas dan mudah untuk mendapatkan informasi sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan maka publik dapat menilai dari dua sisi dan untuk menghindari persepsi negatif yang muncul akibat pemberitaan yang tidak berimbang. Dalam konteks pelaksanaan diplomasi publik, pemerintah di kedua negara dapat bekerjasama dengan media massa, tidak hanya dalam penjelasan tentang kebijakan luar negeri namun dapat membangun program-program bersama yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kesepahaman masyarakat. Pada masa yang lalu televisi milik pemerintah di kedua negara pernah mengadakan acara bertajuk "Titian Muhibah" yang mana didalamnya terdapat program seni dan budaya dari dua negara.

Implementasi diplomasi publik melalui media internet semakin lama akan menjadi semakin signifikan. Hal ini didasarkan atas hasil penelitian tentang pengguna internet dunia pada tahun 2012.⁷⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa pada sampai bulan Juni 2012, pengguna internet di Indonesia mencapai jumlah 55.000.000 orang dari 248.645.008 orang penduduk Indonesia. Atau dengan kata lain 22,1% dari total penduduk Indonesia telah memiliki akses dan menggunakan internet. Sedangkan pengguna media sosial Facebook di Indonesia mencapai 47.539.220 orang. Sedangkan pengguna internet di Malaysia mencapai 17.723.000 orang dari total penduduk Malaysia 29.159.972 orang, atau 60,7% dari total penduduknya. Pengguna Facebook di Malaysia mencapai 13.078.320 orang. Data-data ini memberikan peluang dan kesempatan untuk menggunakan media internet dan media sosial juga sebagai ajang untuk melakukan kegiatan diplomasi publik.

Penutup dan Rekomendasi

Diplomasi publik dapat menjadi satu sarana yang tepat untuk mengatasi permasalahan antara Indonesia dan Malaysia. Diplomasi Publik bertujuan untuk membangun citra positif dari sebuah negara. Fokus dari diplomasi publik adalah publik itu sendiri dimana pemerintah menempatkan publik sebagai subyek maupun obyek dari kegiatan diplomasi publik.

Implementasi diplomasi publik

⁷⁶ www.internetworldstats.com/stats3.htm, diakses pada 29 Februari 2013.

Indonesia dan Malaysia menghadapi beberapa tantangan. Beberapa permasalahan berkaitan dengan bagaimana pemerintah dapat mengoptimalkan perangkat dan implementasi dari diplomasi publik yang dilaksanakan. Tentu saja hal ini harus didasari dengan komitmen yang kuat pada diplomasi publik. Komitmen ini memang sudah ditunjukkan dengan dibentuknya bagian diplomasi publik pada masing-masing Kemenlu, namun perlu untuk lebih ditingkatkan lagi terutama juga pada publik didalam negeri melalui beberapa kegiatan ke masyarakat. Pemerintah kedua negara sering melakukan pertemuan resmi. Pada tahun 2010, kedua negara sepakat untuk bertemu dalam *Joint Commision Meeting Forum* dimana diikuti dengan pembentukan kelompok kerja untuk menangani isu-isu tertentu. Kedua negara juga melakukan pertemuan setiap tahun untuk membahas isu-isu terkini. Namun permasalahannya adalah pada bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi tentang hal-hal yang dibahas dan sejauh mana pelaksanaan dari kesepakatan yang diperoleh. Dalam hal ini pemerintah dapat lebih mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kesepakatan dan kebijakan yang diambil diikuti dengan penjelasan dalam beberapa kegiatan ke masyarakat secara langsung.

Kedua, seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, hubungan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia baik secara individu maupun dalam kelompok atau lembaga tertentu sudah terjalin dengan baik. Banyak diantara mereka yang melakukan kerjasama dan melakukan banyak hal bersama seperti pameran, dialog, forum, seminar dan penelitian. Hal ini dilakukan secara independen oleh mereka sendiri. Namun, seperti halnya permasalahan pertama, hasil atau informasi tentang apa saja yang telah diraih dari kerjasama tersebut masih

belum terpublikasi dengan baik sehingga informasi-informasi positif sering kali tidak tercover oleh media massa dan justru sering muncul opini-opini provokatif yang menyebabkan semakin bertambahnya persepsi negatif satu sama lain. Dalam konteks ini, kiranya perlu bagi pemerintah untuk mengambil bagian dalam beberapa kegiatan tersebut minimal membantu menyebarluaskan informasi tentang kegiatan dan hasilnya kepada masyarakat.

Ketiga, munculnya atau menguatnya persepsi negatif antara kedua negara juga dapat dipicu oleh pemberitaan media massa yang tidak berimbang. Oleh karena itu maka perlu untuk dibentuk sebuah lembaga penelitian atau pengawasan yang beranggotakan ahli atau orang-orang yang dianggap kompeten dari kedua negara untuk menjalankan fungsi pengawasan. Lembaga ini dapat dibentuk bukan untuk mengawasi dalam konteks pengawasan ketat, namun lebih kepada pengawasan terhadap pemberitaan yang dianggap kurang data atau tidak berimbang, atau pemberitaan yang cenderung emosional dan dapat memicu permasalahan. Kedua negara mungkin bisa mendirikan semacam Komisi Penyiaran bersama antara Indonesia dan Malaysia.

Keempat, berkaitan perubahan generasi. Seperti halnya yang dijelaskan sebelumnya bahwa perubahan generasi juga membutuhkan perubahan pendekatan. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan yang baru kepada generasi muda di kedua negara tentang kekerabatan atau keserumpunan mereka. Pertukaran pelajar dapat dilakukan sejak dulu sehingga dari awal mereka dapat mengenal satu sama lain. Pada tingkatan yang lebih tinggi bisa dimungkinkan untuk melakukan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) bersama oleh mahasiswa Indonesia dan Malaysia di Indonesia dan

Malaysia juga. Selain itu, sekali lagi perlu ditegaskan pada permasalahan kurikulum pendidikan tentang sejarah Asia Tenggara dan hubungan keserumpunan antara Indonesia dan Malaysia.

Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan diplomasi publik. Pemerintah dapat mengundang masyarakat, akademisi, professional, pebisnis, komunitas keagamaan, artis dan lain-lain untuk bekerja bersama membangun citra positif dan sekaligus menyebarkan informasi kepada masyarakat untuk membangun kesepahaman bersama. Pemerintah juga dapat memposisikan diri sebagai jembatan atas masyarakat dari keduabelah pihak yang memiliki banyak kemiripan budaya dalam banyak kegiatan yang mengutamakan identitas bersama. Kegiatan-kegiatan semacam ini akan sangat membantu dalam menyebarkan informasi positif kepada masyarakat Indonesia dan Malaysia, dan kemudian dapat membangun citra positif, memperkuat kesepahaman bersama, dan menghindari konflik.

Daftar Pustaka

- Anhold, Simon (ed) *Place Branding 2*, Palgrave Mc Millan,
- Barston, R.P, 1997, *Modern Diplomacy*, Pearson Education, England
- Carr, E.H, 1983, *The Twenty Years' Crisis 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations*, Macmillan, Basingstoke
- Cull, Nicholas J "Public Diplomacy' before Gullion : The Evolution of a Phrase", <http://uscpublicdiplomacy.com/pdfs/gullion.pdf>, accessed on December 20th, 2009
- Gregory, Bruce, 2008, *Public Diplomacy : The Sunrice of an Academic Field*, The ANNALS of The American Academy of Political and Social Science, accessed on December 28th, 2009, <<http://ann.sagepub.com/cgi/content/abstract/616/1/274>> .
- Hermawan, Yulius P (ed), 2007, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi* (Transformation in the International Relations Studies : Actors, Issues and Methodology), Graha Ilmu Bandung
- Hoge Jr, James F, 2003, *The Benefits of Public Diplomacy and Exchange Programs*, National Council for International Visitors, March 12, 2003
- Huntington, P Samuel, 1992, *The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press.
- Manheim, Jarol B, 1990, *Strategic Public Diplomacy : The Evolution of Influence*, Oxford University Press, New York
- Melisen, Jan, (ed) , 2005, *The New Public Diplomacy : Soft Power in International Relations*, PALGRAVE MCMILAN, New York
- Perwita, Banyu, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (The Introduction of International Relations), Rosda Karya, Bandung
- Sukawarsini, Djelantik, 2008, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Diplomacy : Theory and Practice), Graha Ilmu, Bandung
- U.S. Department of State, 1987, *Dictionary of International Relations Terms*,
- Taylor, Humfrey 2008, *The Not-So-Black Atr of Public Diplomacy*, World Policy Journal, Winter 2007/2008, The World Policy Institute
- Tuch, Hans, 1990, *Communicating with the World : U.S Public Diplomacy*

Overseas, St. Martin's Press, New York

Website

Sriwijaya Post, 9 Maret 2011

Republika, 4 maret 2011

Rimanews.com, 5 Desember 2011

http://www.kbrikualalumpur.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=176:neraca-perdagangan-indonesia-dengan-malaysia-2004-2009&catid=46:perdagangan, diakses tanggal 30 Februari 2013.

www.internetworldstats.com/stats3.htm , diakses pada 29 Februari 2013.

Public Diplomacy Alumni Association, “What is Public Diplomacy”, accessed in December 8, 2009
<http://www.publikdiplomacy.org/1.htm>